



LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA TAHUN 2024

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BADUNG**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas perkenan-Nya Laporan Tahunan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2024 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung masih jauh dari yang diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana, prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Mangupura, 7 November 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Badung,




Drs. I Putu Eka Merthawan, M.Si
NIP. 19651220198612100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
1. Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi.....	7
2. Layanan Informasi Publik.....	7
3. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik	7
4. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi.....	8
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PELAKSANA	9
BAB IV KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	12
BAB VI PENUTUP	14

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung selama tahun 2024 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aspek-aspek penting dalam kebijakan ini umumnya meliputi:

1. Standar Pelayanan, Dinas telah menetapkan standar pelayanan yang jelas, meliputi waktu penyelesaian, persyaratan, dan prosedur pelayanan. Standar ini dapat ditemukan di website resmi atau kantor dinas.
2. Informasi yang dibuka, Jenis informasi yang dapat diakses publik mencakup berbagai hal, mulai dari profil dinas, struktur organisasi, tugas dan fungsi, hingga data terkait perizinan, program kerja, anggaran, dan realisasinya.
3. Saluran Informasi, Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui berbagai saluran, seperti:
 - a. Website resmi, <https://disperinaker.badungkab.go.id/>.
 - b. Pengumuman, melalui media sosial (instagram, tiktok, youtube).

- c. Layanan informasi, Masyarakat dapat mendatangi langsung kantor dinas untuk memperoleh informasi secara langsung.
 - d. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui PPID.
4. Mekanisme Permohonan Informasi, Terdapat prosedur yang jelas bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi. Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau elektronik.
 5. Waktu Tanggapan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung telah menetapkan batas waktu untuk merespon permohonan informasi.
 6. Biaya, Seluruh informasi publik dapat diakses secara gratis.
 7. Penyelesaian Sengketa, Jika terjadi sengketa terkait informasi publik, terdapat mekanisme penyelesaian yang jelas, yaitu melalui Komisi Informasi.

Tujuan Kebijakan:

1. Meningkatkan transparansi, adalah membuka akses informasi publik untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas: Mewajibkan penyelenggara negara untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja dinas.

Adapun dasar kebijakan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
- SK Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tentang Penetapan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2024.

Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

Tugas PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID.
- c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik.
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

Wewenang PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung :

- a. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik.
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- c. Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana akan diterima oleh Koordinator PPID Pelaksana lalu diteruskan kepada bidang terkait untuk apabila telah diterima tanggapan Kepala Bidang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana menyediakan ruang/ loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Disamping penyediaan ruang/ loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien. Dinas juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID Pelaksana melalui web <https://disperinaker.badungkab.go.id/>. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA.

2. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian laman yang mudah diakses diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dapat dipuaskan.

3. SARANA PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yaitu Ruangan Desk Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

4. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung ditetapkan dengan SK Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 15 Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan, yaitu :

Ketua Tim : I Gusti Agung Putri Maharani, SE

Anggota Tim :

- 1. Ketut Gede Putra Adnyana, ST., MM
- 2. I Made Agus Wira Wijaya, S.Pd
- 3. Ida Bagus Putra Brahmanta, ST
- 4. Ni Luh Gde Putri Septiarani, SM

Pelayanan informasi PPID Pelaksana dilaksanakan oleh petugas pengelola informasi masing- masing bidang. Adapun Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, yaitu :



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PELAKSANA

1. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2024

Permohonan informasi publik pada PPID Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada Tahun 2024 ada 151 Permohonan Informasi.

DAFTAR REGISTER INFORMASI PUBLIK
YANG DIAJUKAN MELALUI PPID KABUPATEN BADUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	JUDUL PERMOHONAN	STATUS	WAKTU MENANGGAPI	ALASAN PENOLAKAN
1	2 JANUARI 2024	KETUT SUARKA	DESA KUTUH, KUTA SELATAN	KONSULTASI VERIFIKASI SIAP KERJA	TERPENUHI	1 HARI	
2	2 JANUARI 2024	I WAYAN BAYUNA	DESA KAMPIAL, KUTA SELATAN	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
3	2 JANUARI 2024	EUPRASIA ANINDITA	SEMINYAK	KONSULTASI SK PP	TERPENUHI	1 HARI	
4	2 JANUARI 2024	TRI WIDYANTARA	SEMINYAK	KONSULTASI SK PP	TERPENUHI	1 HARI	
5	3 JANUARI 2024	I KETUT DIKI PRADANA	JL RAYA SEMINYAK NO.10	KONSULTASI SK PP	TERPENUHI	1 HARI	
6	3 JANUARI 2024	MADE DIKA SUGIANTARA	BR DARMA SABA	VERIFIKASI SIAP KERJA	TERPENUHI	1 HARI	
7	3 JANUARI 2024	DW A.MD INDAH DESIYANTI	JL PETITENGET 188 KEROBOKAN	KONSULTASI SK PP	TERPENUHI	1 HARI	
8	4 JANUARI 2024	FIRMA HUKUM IRMA	JL SEGITIGA PERMATA III NO.6 PEDUNGAN DPS	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
9	4 JANUARI 2024	PUTU LINAWATI	PT DCA	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
10	4 JANUARI 2024	LP ROASTITI	PLATINUM HOTEL	KONSULTASI SK PP	TERPENUHI	1 HARI	
11	1 FEBRUARI 2024	DWININA	PT LUXURY BALI VILLAS	PENGALJUAN PP 2024-2026	TERPENUHI	1 HARI	
12	1 FEBRUARI 2024	KADEK ERA HANDAYANI	DALUNG PERMAI	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
13	1 FEBRUARI 2024	KRISNA SASTRA GUNA	BR SULANAGI	KONSULTASI KTKLN	TERPENUHI	1 HARI	
14	1 FEBRUARI 2024	CESY WINDA	SADING MENOWI	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
15	1 FEBRUARI 2024	HERVI	RENON	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
16	1 FEBRUARI 2024	DANUJANTARI	PT SECANA BEACHTOWN BERAWA	PENGALJUAN PP 2024-2026	TERPENUHI	1 HARI	
17	2 FEBRUARI 2024	PUTU EKA	PT.PAMDI KAYU AYU	PENGESAHAN PKWT	TERPENUHI	1 HARI	
18	2 FEBRUARI 2024	WIWIN DWI M	PT.KLESET INDEPENDENT	PENGESAHAN PKWT	TERPENUHI	1 HARI	
19	2 FEBRUARI 2024	I KD YOGA KRISNA PUTRA	NUSA DUA	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
20	2 FEBRUARI 2024	MAD EDODY GUSMAN	PEDUNGAN	KONSULTASI SK PP	TERPENUHI	1 HARI	
21	5 FEBRUARI 2024	LINA F ZACHARIAS	TUBAN	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
22	1 MARET 2024	KADEK RICHIA ULANIA JUNI	BR BERNASI BUDUK	KONSULTASI SK PP	TERPENUHI	1 HARI	
23	1 MARET 2024	I WAYAN CHRISTYAN W	QUEST HOTEL KUTA	KONSULTASI SK PP	TERPENUHI	1 HARI	
24	1 MARET 2024	ADI SURYANI	RAYA KAMPAL BLOK L-23	KONSULTASI KTKLN	TERPENUHI	1 HARI	
25	4 MARET 2024	NI WAYAN YULIANTINI	PERUM PEGENDING BLOK X10 NO.29 DALUNG	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
26	4 MARET 2024	INRAWATI	GANG JEPUN TIBUBENENG	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
27	4 MARET 2024	SAMSIR	GANG JEPUN TIBUBENENG	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
28	4 MARET 2024	NI LUH PUTU ARIE RAHAYU	LPK BALI JAPAN	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
29	4 MARET 2024	I KADEK ADI SASTRAWAN	PURI MUMBUL PERMAI JIMBARAN	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
30	4 MARET 2024	I GEDE JULIANTARA	BR.ASEMAN KANGIN	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
31	4 MARET 2024	DW A.MD INDAH DESIYANTI	KANVAZ RESORT SEMINYAK	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
32	5 MARET 2024	UASNI SABANG	TIBUBENENG	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
33	5 MARET 2024	ALFIS	TIBUBENENG	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
34	5 MARET 2024	I WAYAN SUPARTA	BR.TEGAL KUNING -BONGKASA	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
35	5 MARET 2024	I PT GD OGI WIRAYADA	DALUNG PERMAI BLOK II NO.38	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
36	5 MARET 2024	NI WAYAN ERAWATI	JIMBARAN	KONSULTASI AKI	TERPENUHI	1 HARI	
37	5 MARET 2024	IDA BAGUS GEDE AMBARA ARTHA	PT.BALI STAFF SOLUTIONS	KONSULTASI SK PP	TERPENUHI	1 HARI	
38	16 APRIL 2024	DESAK VIVIN INDIRIYANI	BLACKSAND PROPERTY MANAGEMENT	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
39	18 APRIL 2024	DIAN PRSTIWI	KEROBOKAN	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
40	19 APRIL 2024	NI MADE WAWIA	HOT NDIP PRODUCTIONS	KONSULTASI WLKP	TERPENUHI	1 HARI	
41	23 APRIL 2024	DANI IDA FITALOKA	DALUNG	KONSULTASI PEMBUATAN AKI	TERPENUHI	1 HARI	
42	24 APRIL 2024	I DEWA GEDE HAKKI	DENPASAR	KONSULTASI MEDIASI	TERPENUHI	1 HARI	
43	24 APRIL 2024	IDA BAGUS GEDE AMBARA ARTHA	PT BALI STAFF SOLUTIONS	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
44	24 APRIL 2024	NGURAH DAUTA	PT QUEEUS TANDOR	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
45	29 APRIL 2024	NI PUTU DIANTARI	TUKA DALUNG	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
46	29 APRIL 2024	NI LUH SRI JUNI ANTARI	BR WERDHI LINGASAN	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
47	30 APRIL 2024	NI KM KUSUMA CANDRAWATI	KODONGANAN	KONSULTASI VERIFIKASI ID CPMI	TERPENUHI	1 HARI	
48	30 APRIL 2024	SIMON JOHN ALEXANDER BATES	CANGGU PERMAI	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
49	30 APRIL 2024	NI WAYAN SWANDEWI	HARPER KUTA BALI	KONSULTASI LKS	TERPENUHI	1 HARI	
50	30 APRIL 2024	SALISTYONO	BR UBUNG JIMBARAN	KONSULTASI SIAP KERJA	TERPENUHI	1 HARI	
51	30 APRIL 2024	DERY WULANDARI	PT SAHARA FAJARINDO	KONSULTASI CPMI	TERPENUHI	1 HARI	
52	30 APRIL 2024	HADI	WATERBOOM BALI	KONSULTASI LKS	TERPENUHI	1 HARI	
53	3 MEI 2024	LUH DERY WULANDARI	PT SAHARA FAJARINDO	KONSULTASI VERIFIKASI CPMI	TERPENUHI	1 HARI	
54	6 MEI 2024	NI MADE JUNITA PURNAMA	TAMAN AIR SPA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
55	6 MEI 2024	MARLIH KHUSUMAWATI	DANOYA VILLA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
56	6 MEI 2024	NANDA	BRUDER INDONESIA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
57	7 MEI 2025	IDA BAGUS GEDE AMBARA ARTHA	PT BALI STAFF SOLUTIONS	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
58	8 MEI 2024	NI MADE WAWIA	PT SUSHIMI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
59	8 MEI 2024	MANIK KUSUMAWATI	PT DANOWA WISNU	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
60	8 MEI 2024	NI MADE AYU PRISKA CAHYA NINGSIH	JL NUANSA UTAMA SELATAN XXI/20	KONSULTASI VERIFIKASI CPMI	TERPENUHI	1 HARI	
61	8 MEI 2024	GEDE AJUS VINGKY SAPUTRA	PT DWICITRA PUTRA MANDIRI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
62	13 MEI 2024	DIAN PRATIWI	PT BONOFARTUM	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
63	13 MEI 2024	SHERLY	VOUK HOTEL SUITS	KONSULTASI MEDIASI	TERPENUHI	1 HARI	
64	4 JUNI 2024	BELA	PT MAKAN PARA DEWATA	KONSULTASI RPTKA	TERPENUHI	1 HARI	
65	4 JUNI 2024	MEGA	QUEST HOTEL KUTA	KONSULTASI PKWT	TERPENUHI	1 HARI	
66	7 JUNI 2024	ANANDARI PUTRI	BPR URBAN	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
67	11 JUNI 2024	YULIO MAGDALENA	JL TIBUBENENG DALUNG, KUTA UTARA	KONSULTASI VERIFIKASI CPMI	TERPENUHI	1 HARI	
68	11 JUNI 2024	APRILIA PUJI LESTARI	PT BALI NO.47	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
69	11 JUNI 2024	TATIANA REID	JL MERPATI KOMPLEK BURUNG TUBAN	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
70	13 JUNI 2024	VIVIN INDIRIYANI	BLACKSAND VILLAS	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
71	13 JUNI 2024	ERNY WIDIASTUTI	PT SCB	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
72	13 JUNI 2024	DAVID	JL PULAU KAWA DPS	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
73	19 JUNI 2024	TRISNA UMEDA	JL PADMA UTARA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
74	19 JUNI 2024	NGURAH DHARMA PUTRA	JL PANTAI BERAWA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
75	19 JUNI 2024	NATASHA	PT SUSHIMI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
76	19 JUNI 2024	NGURAH DHARMA PUTRA	PT BALI MITRA INTERNATIONAL	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
77	19 JUNI 2024	KUSUMA MANDALA	JL GATOT SUBROTO BARAT	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
78	3 JULI 2024	KOMANG WIDIADA	PT HANDARU SAKTI	KONSULTASI PENGESAHAN PP	TERPENUHI	1 HARI	
79	4 JULI 2024	YAN PITER	PT YOUNG HOME STYLE	KONSULTASI MEDIASI	TERPENUHI	1 HARI	
80	4 JULI 2024	ARDI	PT WAMIN JOON	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	

81	8 JULI 2024	DAVID	JL. PULAN KAWI DPS		TERPENUHI	1 HARI	
82	9 JULI 2024	NYOMAN DHARMA PUTRA	FINUS BALI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
83	10 JULI 2024	ADI TRYATA	BLO HOTEL AND S18 BALI VILLAS	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
84	10 JULI 2024	ALBERT HALIM	PT SUMABAYU MANDALA BALI	KONSULTASI PELAPORAN PKWT	TERPENUHI	1 HARI	
85	10 JULI 2024	KM A.S KUSUMAWATI	JL. TIBUNG SARI BTN DALUNG INDAH D/8	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
86	15 JULI 2024	ANGEL	PT.SAMABAYU MANDALA	KONSULTASI PKWT	TERPENUHI	1 HARI	
87	26 JULI 2024	ADI TRYATA	PT. JAYATAMA BALI PROPERTI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
88	30 JULI 2024	I GED EDANY MAHENDRA	JL. PETITENGET NO. 1000X	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
89	30 JULI 2024	YULIA DEWI	BEACH WALK	KONSULTASI PKWT	TERPENUHI	1 HARI	
90	30 JULI 2024	KADEK MEIGILJA MAHENDRA	JL. BEJI AYU	KONSULTASI PERATURAN DAERAH	TERPENUHI	1 HARI	
91	6 AGUSTUS 2024	NOVI	PT.GEONET PROPERTIES INTERNATIONAL	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
92	7 AGUSTUS 2024	SUKMA	PT.BALI PROPETI KONTRUKSI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
93	12 AGUSTUS 2024	PUSPA	PT ANNATA HOTEL AND RESORT	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
94	13 AGUSTUS 2024	YUSTARI	THE NEST HOTEL AGRANUSA VILLA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
95	14 AGUSTUS 2024	KOMANG APRIYAMA	PT.SANJAYA THAIRY BAHTERA	KONSULTASI VERIFIKASI IDI CPMI	TERPENUHI	1 HARI	
96	14 AGUSTUS 2024	I DEWA GEDE RENDRA	JL. UTAMA NO9 BENOA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
97	14 AGUSTUS 2024	AGRA TEFA	KTR ADVOKAT AGRARINUS TEFA	KONSULTASI PENGESAHAN RHK	TERPENUHI	1 HARI	
98	19 AGUSTUS 2024	DIANA CANDRA	PT.MENARA PERDANA	PELAPORAN PHK	TERPENUHI	1 HARI	
99	19 AGUSTUS 2024	YUWIKHA ANWAR	JL. DIYO ENGGAL MAKUMUR	PELAPORAN PHK	TERPENUHI	1 HARI	
100	19 AGUSTUS 2024	NI MADE WAWI	PT.SUSHIMI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
101	20 AGUSTUS 2024	KD MULIHARTINI	PT.NINETYNINE JALAN LEGENDS	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
102	21 AGUSTUS 2024	ADE MEIRAH	JL. NUANSA HIJAU UTAMA II NO 4 UBUNG	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
103	3 SEPTEMBER 2024	TRISNADEWI	FF SUNSET ROAD	KONSULTASI REVISI PP	TERPENUHI	1 HARI	
104	3 SEPTEMBER 2024	BENYAMIN E.N.K	JL.VETERAN 38 BUDUK	KONSULTASI REVISI PP	TERPENUHI	1 HARI	
105	3 SEPTEMBER 2024	ANKASA PURA SUPPORT	JL.BY PAS NGURAH RAI NO.18	KONSULTASI REVISI PP	TERPENUHI	1 HARI	
106	4 SEPTEMBER 2024	MILKA	DENPASAR	KONSULTASI REVISI PP	TERPENUHI	1 HARI	
107	4 SEPTEMBER 2024	AGAS	PT.OUR FAMILY BALI	KONSULTASI REVISI PP	TERPENUHI	1 HARI	
108	4 SEPTEMBER 2024	RATNA SIREGAR	QUEST HOTEL KUTA	KONSULTASI PKWT	TERPENUHI	1 HARI	
109	4 SEPTEMBER 2024	ERWIN SIREGAR	ESA LAW OFFICE	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
110	4 SEPTEMBER 2024	M ALFIN TOFANO	SIMSON SIDABUTER AND PARTNERS	KONSULTASI MEDIASI	TERPENUHI	1 HARI	
111	4 SEPTEMBER 2024	ARMAN	DISCOVERY KETHA PLAZA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
112	4 SEPTEMBER 2024	PT LGL	SUNSET ROAD	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
113	2 OKTOBER 2024	NI MADE MULASARI	JL. ARJUNA III NO.190 DALUNG		TERPENUHI	1 HARI	
114	2 OKTOBER 2024	META PURMINA	JL. RAYA MENGWITANI NO.182	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
115	2 OKTOBER 2024	UNGGUL UTAMI	BR.KUNG DALUNG	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
116	2 OKTOBER 2024	THEREA	CARGO	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
117	3 OKTOBER 2024	YULIA DWI	BEACH WALK	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
118	7 OKTOBER 2024	DANILE HENRY GECANDHA	PT.IVO ROYAL RESORT INDO	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
119	7 OKTOBER 2024	YUSTARI RAHAYU	JL. PRATAMA NOL 99 NUSA DUA	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
120	8 OKTOBER 2024	WINDA	PT.KANDAPAT KARYA NUSANTARA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
121	8 OKTOBER 2024	ADI MAHARDIKA	BRAWA BALI ABADI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
122	9 OKTOBER 2024	CHRISTYA WIDYANA	QUEST HOTEL KUTA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
123	10 OKTOBER 2024	INDRIA	PT.YUNI FUNITURE	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
124	10 OKTOBER 2024	DENNICE HENRY GEVANDHA	PT.ROYAL RESORT INDONESIA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	

125	10 OKTOBER 2024	NOVI	PT. GEONET	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
126	6 NOPEMBER 2024	AGUNG ANOM	PT.IRINA LANDAU STUDIO	KONSULTASI VALIDASI RPTKA	TERPENUHI	1 HARI	
127	7 NOPEMBER 2024	SUNANTARA	PT.MILLIE UTAMA SAKTI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
128	8 NOPEMBER 2024	LAKSMI DEWI	ZETTA BY TE PTE LTD	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
129	8 NOPEMBER 2024	NGURAH DHARMA	FINNS	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
130	8 NOPEMBER 2024	LISA TASJANA	JL. NUANSA BUKIT	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
131	8 NOPEMBER 2024	SYAMIL FASYA	RICHARD LEO LAW FIRM	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
132	12 NOPEMBER 2024	AGUS PURNAWAN	JL KEDIRI TUBAN	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
133	12 NOPEMBER 2024	YUMI	PT MESIKAO	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
134	12 NOPEMBER 2024	ENDANG	PT.LA JOYA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
135	12 NOPEMBER 2024	SUMARTINI	PENINSULA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
136	12 NOPEMBER 2024	LILIAN ANGELLA C	PT.CITRA JIMBARAN INDAH HOTEL	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
137	12 NOPEMBER 2024	ARI PURNAMAYANA	PT.DI UMA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
138	1 DESEMBER 2024	MADE SARINI	RESTAURANT	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
139	3 DESEMBER 2024	TITIS AYU	JIMBARAN NUSA DUA	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
140	6 DESEMBER 2024	ANIK APRIANTI	BR. GULINGAN ABIANSEMAL	KONSULTASI AK2	TERPENUHI	1 HARI	
141	6 DESEMBER 2024	SYARINI	BPS BADUNG	KONSULTASI UMK	TERPENUHI	1 HARI	
142	6 DESEMBER 2024	ANDREA	PT.HYUNDAI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
143	6 DESEMBER 2024	FIRDIHA	BENOA	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
144	6 DESEMBER 2024	PARAMITHA ACINTYA	JL PANTAI BERAHA NO.8	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
145	6 DESEMBER 2024	IDA AYU BINTANG	PT.PMA UNIGROUP GN	KONSULTASI IMTA	TERPENUHI	1 HARI	
146	6 DESEMBER 2024	ARDIN	PT.WAMINJOJO	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
147	6 DESEMBER 2024	BAYU ANUGRAH	SHERATON BALI KUTA RESORT	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
148	6 DESEMBER 2024	SUNANTARA	PT SHAN RESTORAN BALI	KONSULTASI PP	TERPENUHI	1 HARI	
149	18 DESEMBER 2024	CATUR AGUNG PRASETYO	LAW BALI ADVOCAT	KONSULTASI MEDIASI	TERPENUHI	1 HARI	
150	13 DESEMBER 2024	NI PUTU NINA ARISTA D	NUSA DUA JIMBARAN	KONSULTASI AK1	TERPENUHI	1 HARI	
151	20 DESEMBER 2024	SYAMIL FASYA	RICHARD LEO LAW FIRM	KONSULTASI MEDIASI	TERPENUHI	1 HARI	

2. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.

Waktu yang diperlukan PPID Pelaksana dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik di tahun 2024, rata rata memenuhi waktu yang telah ditetapkan sesuai mekanisme yang ada, terkecuali informasi tersebut belum dikuasai oleh PPID pelaksana, masih dikuasai pada PPID Utama sehingga membutuhkan waktu dalam memenuhi permohonan informasi tersebut, namun permohonan tersebut dapat terpenuhi sehingga tidak terjadinya sengketa informasi.

3. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA.

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada Tahun 2024 **tidak ada**.

BAB IV

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai dinas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi ketenagakerjaan dan industri kepada masyarakat terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian- bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Permasalahan yang dihadapi PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Jumlah SDM yang terbatas dan belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi publik menghambat efektivitas pelayanan informasi.

2. Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti perangkat komputer dan jaringan internet, menghambat proses digitalisasi layanan informasi.

3. Belum Optimalnya Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi antara PPID Pelaksana dengan PPID Utama, serta antar-sub bagian/unit kerja, masih belum maksimal, menghambat konsistensi dalam penyediaan dan klasifikasi informasi.

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Masih Rendah

Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan dan fungsi PPID sebagai layanan keterbukaan informasi, sehingga permintaan informasi masih minim.

5. Belum Terintegrasinya Sistem Pengelolaan Informasi

Belum adanya sistem digital yang terintegrasi untuk manajemen dokumen dan permintaan informasi, menyebabkan proses masih dilakukan secara manual dan kurang efisien.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung perlu melakukan langkah-langkah strategis. Pertama, melakukan digitalisasi layanan dengan mengembangkan website dan aplikasi mobile yang user-friendly. Kedua, melibatkan masyarakat secara aktif melalui survei kepuasan dan forum diskusi. Ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan. Terakhir, mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menjalin kolaborasi dengan instansi terkait. Dengan demikian, diharapkan pelayanan informasi dapat lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Inti dari rekomendasi ini adalah transformasi digital yang dipadukan dengan pelibatan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun rinciannya:

1. Digitalisasi Layanan

Website dan Aplikasi Mobile : Dengan adanya platform digital ini, masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Informasi yang disajikan pun harus mudah dipahami dan navigasinya intuitif. Tujuannya untuk memudahkan akses informasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan pelayanan.

2. Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat dapat melalui Survei Kepuasan dan Forum diskusi. Melalui Survey Kepuasan, Dinas dapat mengetahui secara langsung apa yang diharapkan oleh masyarakat dari pelayanan informasi. Sedangkan melalui Forum Diskusi, Dinas dapat memperoleh masukan dan ide-ide segar untuk perbaikan layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi layanan, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendapatkan feedback yang berharga.

3. Peningkatan Kompetensi SDM :

Pelatihan Berkelanjutan: Pelatihan akan memastikan bahwa petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, menjaga relevansi informasi yang disampaikan, dan meningkatkan produktivitas.

4. Integrasi Data dan Kolaborasi :

Integrasi Data: Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, Dinas dapat menyajikan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Kolaborasi: Kerjasama dengan instansi terkait akan memperkaya informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Tujuan: Meningkatkan kualitas informasi, memperluas cakupan layanan, dan menghindari duplikasi data.

Rekomendasi ini bertujuan untuk menjadikan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung sebagai pusat informasi yang andal, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat. Dengan implementasi yang konsisten, diharapkan kualitas pelayanan informasi dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Laporan tahunan ini telah memaparkan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan. Ke depan, PPID Pelaksana akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan aksesibilitas informasi: Menyediakan berbagai saluran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, baik secara online maupun offline.
2. Penyederhanaan prosedur: Menyederhanakan prosedur permohonan informasi untuk memudahkan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, petugas PPID diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional.
4. Kerjasama lintas sektor: Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memperkaya sumber informasi dan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi.
5. Evaluasi kinerja secara berkala: Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian, diharapkan PPID Pelaksana dapat menjadi mitra strategis bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Mangupura, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Badung,



Drs. I Putu Eka Merthawan, M.Si
NIP. 196512201986121007

Dokumentasi Pelayanan Publik :



